

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada 2 Maret 2020 pemerintah mengumumkan dua kasus pasien positif *Covid-19* di Indonesia. Setelah Presiden Jokowi mengumumkan ada dua warga terjangkit virus corona dan sedang dirawat di Rumah Sakit Penyakit Infeksi Sulianti Saroso Jakarta ini menjadikan Indonesia memasuki babak baru dalam pencegahan virus Corona.¹ Pemerintah Indonesia melakukan langkah-langkah antisipasi, Antara lain menggunakan *Health Alert Card* atau *Yellow Card*, juga *Thermal Scanner* untuk mengecek suhu tubuh di atas 38,5 derajat Celsius di pintu masuk dan keluar Republik Indonesia. Alhasil, menurut Pando, data laporan kumulatif kasus konfirmasi positif *Covid-19* yang setiap hari ditemukan oleh pemerintah menunjukkan bahwa sejak Maret hingga April data grafik semakin meningkat signifikan di wilayah Sumatera Utara, Bali, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara. Dan fakta lapangan menunjukkan bahwa penularan virus Corona terjadi dengan sangat cepat. Dalam 11 hari setelah pengumuman kasus pertama, jumlah kasus positif corona mencapai 69 orang, 4 orang di antaranya meninggal dan 5 kasus sembuh.²

Penanganan cepat diusahakan pemerintah dengan membentuk tim satuan tugas penanggulangan *covid-19* yang dipimpin langsung oleh Presiden. Sejak awal ada *task force* (satuan tugas). Berkaitan dengan langkah itu, pada tanggal 13 Maret 2020 Presiden menandatangani Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19*.

¹ <https://www.liputan6.com/news/read/4191695/kronologi-terungkapnya-2-orang-di-indonesia-positif-virus-corona> diakses pada 20 Februari 2020

² <https://nasional.kompas.com/read/2020/03/02/11265921/breaking-news-jokowi-umumkan-dua-orang-di-indonesia-positif-corona?page=all> diakses pada 20 Februari 2020

Langkah strategis juga segera diambil pemerintah terutama dalam bidang kesehatan. Rumah sakit rujukan *Covid-19* ditambah. Awalnya disiapkan 100 RS pemerintah ditambah menjadi 132 RS pemerintah, 109 RS milik TNI, 53 RS Polri, dan 65 RS BUMN. Pada tanggal 10 Maret 2020, Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus menulis surat kepada Presiden Jokowi. Salah satu isi surat ini adalah agar pemerintah Indonesia meningkatkan mekanisme tanggap darurat menghadapi *Covid-19* melalui deklarasi darurat nasional. Dan pada tanggal 15 Maret 2020, Presiden melakukan siaran pers di Istana Bogor, menyerukan kerja dari rumah, belajar dari rumah, dan ibadah di rumah. Sejak saat itu, pemerintah bersama seluruh lapisan masyarakat mengkampanyekan pembatasan sosial (*Social Distancing*) demi mencegah penularan *Covid-19*. Kemudian, dengan berbagai pertimbangan, Presiden Jokowi menetapkan peraturan tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan *Covid-19* dan mulai berlaku sejak 1 April 2020. Pemerintah daerah yang ingin memberlakukan PSBB di daerahnya harus melalui persetujuan pemerintah pusat. Selain itu, Presiden juga menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Covid-19*.

Tidak bisa dipungkiri dengan adanya pembatasan aktivitas masyarakat, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung statis. Awal Juni 2020, Bank Dunia memproyeksikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah 0 % pada 2020. Bahkan, dalam skenario terburuk bahkan pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa minus 3,5 %.³ Demi mencegah situasi ekonomi Indonesia semakin tidak kondusif, pemerintah mulai melihat kemungkinan untuk melakukan relaksasi

³ <https://www.wartaekonomi.co.id/read278916/skenario-terburuk-pertumbuhan-ekonomi-indonesia-minus-35> diakses pada 20 Februari 2020

pembatasan sosial. Dalam rapat terbatas pada tanggal 27 Mei 2020, Presiden Jokowi meminta agar dilakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang protokol tatanan normal baru (*New Normal*).

Demi memperkuat pedoman bagaimana masyarakat dalam situasi normal baru, Kementerian Kesehatan menerbitkan Keputusan Menteri Kesehatan No. HK.01.07/Menkes/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Covid-19*. Segala hal terkait bagaimana semestinya masyarakat bertindak di tempat umum dalam situasi normal baru diatur dalam aturan ini. Kebijakan pemerintah untuk menerapkan normal baru ini diharap berbarengan dengan kesadaran masyarakat untuk tetap menjaga protokol kesehatan secara ketat sebab *Covid-19* belum sepenuhnya sirna.

14 September 2020 Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan untuk kembali menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) total. Keputusan ini diambil setelah kasus positif *Covid-19* di Jakarta terus meningkat dan jumlah kematian melonjak drastis. Sesuai ketentuan Kementerian Kesehatan, penerapan PSBB berlaku selama 14 hari dan dapat diperpanjang atau diakhiri. Penerapan PSBB pertama itu berakhir pada 23 April 2020. Anies kemudian memperpanjang penerapan PSBB sebanyak dua kali yakni pada 24 April - 22 Mei 2020 dan 24 Mei - 4 Juni 2020.⁴

Usai perpanjangan PSBB berakhir, kebijakan berubah menjadi PSBB transisi. Anies mulai melonggarkan aktivitas dan membuka sejumlah fasilitas umum. Beberapa fasilitas umum seperti tempat wisata, pusat perbelanjaan, dan rumah ibadah diizinkan dibuka, perkantoran juga boleh beroperasi namun dengan kapasitas 50 persen. PSBB transisi pertama kali diterapkan pada 5 Juni 2020. Anies kemudian beberapa kali memperpanjang penerapan PSBB

⁴ <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-54088411> diakses 20 Februari 2020

transisi. Tercatat lima kali PSBB transisi diberlakukan dan berakhir pada 10 September. Namun di tengah penerapan PSBB transisi, kasus positif *Covid-19* di ibu kota justru terus bertambah. Penambahan kasus per hari bahkan mencapai lebih dari 1.000 kasus. Untuk itu, Anies memilih kembali menerapkan PSBB total serupa di awal pandemi. Ia mengakui tak memiliki banyak pilihan selain menarik rem darurat sesegera mungkin.

Adanya wabah *Covid-19* ini, membuat seluruh aktivitas manusia dibatasi, termasuk kegiatan pembelajaran baik di jenjang sekolah dasar sampai jenjang perkuliahan mulai menerapkan kegiatan belajar dari rumah. Sejak tanggal 15 Maret 2020, Presiden meminta pemerintah daerah membuat kebijakan belajar dari rumah untuk pelajar dan mahasiswa. Jokowi menyerahkan penentuan status kedaruratan daerah kepada kepala daerah. Hal ini dilakukan guna membatasi penyebaran virus yang masif. Kebijakan belajar dari rumah mulai diterapkan pada tanggal 9 Maret 2020 setelah menteri pendidikan dan kebudayaan mengeluarkan surat edaran nomor 2 Tahun 2020 dan nomor 3 Tahun 2020 tentang pembelajaran secara daring dan bekerja dari rumah dalam rangka pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease (Covid- 19)*.⁵

Surat tersebut ditujukan kepada kepala dinas pendidikan provinsi, kepala dinas pendidikan Kabupaten/Kota, kepala lembaga layanan pendidikan tinggi, pemimpin perguruan tinggi, dan kepala sekolah di seluruh Indonesia. Nadiem Makarim mengajak berbagai pihak di dunia pendidikan untuk bergerak bersama menghadapi virus Corona yang telah resmi ditetapkan WHO sebagai pandemi global untuk melakukan langkah-langkah mencegah berkembangnya penyebaran *Covid-19* di lingkungan satuan pendidikan. Kegiatan sekolah pun berlangsung tak seperti tahun-tahun sebelumnya, saat situasi sebelum pandemi virus corona. Menteri Pendidikan dan

⁵ <http://pgdikmen.kemdikbud.go.id/read-news/surat-edaran-mendikbud-nomor-2-tahun-2020> diakses 20 Februari 2021

Kebudayaan mengatakan kondisi Pandemi *Covid-19* tidak memungkinkan kegiatan belajar mengajar berlangsung secara normal. Terdapat ratusan ribu sekolah ditutup untuk mencegah penyebaran, sekitar 68 juta siswa melakukan kegiatan belajar dari rumah, dan sekitar empat juta guru melakukan kegiatan mengajar jarak jauh.⁶

Pembelajaran jarak jauh adalah sistem pembelajaran yang tidak dilaksanakan secara langsung di dalam satu ruangan dan interaksi tatap muka dengan langsung antara pengajar dan pembelajaran (Chandrawati 2010). Pembelajaran jarak jauh memberikan tantangan yang berbeda bagi siswa, orang tua murid, dan guru, pada pelaksanaannya pengajar mencari dan menyiapkan berbagai cara dan alat pembelajaran seperti laptop, komputer, dan handphone agar materi bisa tersampaikan dan diterima dengan baik oleh para pembelajar.⁷

Namun, berbagai tantangan harus dihadapi demi berlangsungnya pendidikan di negeri ini. Untuk Pembelajaran Jarak jauh Permasalahan yang harus dihadapi terutama terkait dengan infrastruktur, seperti listrik dan jaringan internet. Selain itu, tidak sedikit keluarga yang tidak memiliki alat sebagai sarana untuk mengikuti PJJ. Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JJPI) Ubaid Matarji menilai, konsep pembelajaran jarak jauh masih sulit untuk diterapkan saat ini. Menurut Ubaid, faktor sumber daya manusia maupun teknologi dinilai belum mendukung penerapan pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh memiliki tantangan tersendiri yang harus dihadapi. Sehingga kreativitas para pengajar sangat dibutuhkan dalam pelaksanaannya sehingga mereka harus keluar dari gaya konvensional. Mereka juga dituntut harus lebih

⁶ <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2020/08/penyesuaian-keputusan-bersama-empat-menteri-tentang-panduan-pembelajaran-di-masa-pandemi-covid19> diakses pada 2021

⁷ Salmiah R, *Kendala yang Dihadapi Murid Dalam Pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh*, 2020, hal.3

inovatif dalam menyiapkan materi dan mekanisme pembelajaran. Termasuk memanfaatkan seluruh potensi teknologi yang ada untuk membantu pelaksanaan pembelajaran.⁸ Kepala sekolah SMA Negeri menuturkan beberapa kendala yang timbul dalam pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh diantaranya kesulitan guru dalam mengelola Pembelajaran Jarak Jauh dan masih terfokus dalam penuntasan kurikulum.

Sementara itu, tidak semua orang tua mampu mendampingi anak-anak belajar di rumah dengan optimal karena harus bekerja ataupun kemampuan sebagai pendamping belajar anak untuk menyesuaikan kebijakan pembelajaran di era pandemi saat ini. Selain itu, sekolah diharuskan untuk memilih kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran siswa di masa pandemi, sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terkait kurikulum pada masa darurat.

Sudah delapan bulan pandemi *Covid-19* di Indonesia, dan sebagian besar sekolah masih melakukan kegiatan belajar di rumah mengikuti arahan pemerintah yang disebut Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ). Meski telah cukup lama menerapkan PJJ kendala masih kerap didapati di lapangan. Utamanya terkait fasilitas, jaringan, sampai keadaan psikologis siswa, guru, maupun orang tua. Sementara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim sempat menyinggung bahwa PJJ punya banyak dampak buruk terhadap siswa yang bisa melekat secara permanen. Yang paling ia khawatirkan adalah potensi ancaman putus sekolah dan tekanan psikologis.

Meskipun pemerintah sudah mengizinkan pembukaan sekolah di zona hijau dan kuning, ada ragam tahapan yang harus dilalui sebelum siswa bisa belajar seperti situasi sebelum wabah. Sekolah harus bisa memastikan protokol kesehatan diterapkan dengan

⁸ <https://nasional.kompas.com/read/2020/09/03/10063201/kilas-balik-pembelajaran-jarak-jauh-akibat-pandemi-covid-19?page=all> diakses pada 20 Februari 2021

baik, juga harus mendapat izin dari pemerintah daerah, komite sekolah, sampai orang tua siswa.

Berdasarkan berbagai permasalahan di atas maka perlu dicari solusi untuk memecahkan sumber masalahnya. Salah satu yang dapat dijadikan alternatif solusi adalah dengan manajemen pembelajaran. Manajemen pembelajaran dapat dipahami sebagai proses mengelola yang meliputi kegiatan *planning, organizing, actuating* dan *evaluating* proses pembelajaran yang berkaitan dengan seluruh komponen di dalamnya guna meraih tujuan. Menurut Ibrahim Bafadhal Manajemen pembelajaran adalah segala tindakan dalam rangka untuk mencapai proses belajar mengajar yang edukatif, efektif dan efisien. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa manajemen pembelajaran merupakan penataan semua aktivitas pembelajaran mulai dari proses *planning, organizing, actuating* dan *evaluating*, yang meliputi kurikulum inti dan kurikulum penunjang berdasarkan kurikulum yang telah ditetapkan. Tujuan manajemen pembelajaran adalah mengelola berbagai kegiatan peserta didik agar berbagai kegiatan tersebut memberikan dampak positif bagi lembaga (sekolah/madrasah). Pembelajaran diharapkan berjalan dengan lancar, tertib dan baik sehingga dapat memberikan support bagi pencapaian target sekolah dan target pendidikan secara umum. Karena itulah Manajemen Pembelajaran dapat dijadikan salah satu solusi dalam menghadapi masalah yang disebutkan di atas.

Meninjau keputusan dari Menteri Pendidikan terkait sistem pembelajaran selama masa pandemi, SMA Negeri 21 Jakarta adalah salah satu sekolah menengah yang melaksanakan kegiatan belajar dari rumah. Menurut Nadiem, banyak riset menunjukkan bahwa di situasi bencana yang mengharuskan PJJ, ada efek negatif terhadap anak. Bahkan efek ini bisa terus berkepanjangan jika tak ada tindakan yang diambil. "Bagi siswa adalah efek yang bisa sangat negatif dan permanen" Dampak pertama, kata dia, adalah ancaman putus sekolah. Ia mengatakan banyak anak terpaksa bekerja karena

berbagai faktor. Mulai dari PJJ yang tak maksimal hingga ketiadaan fasilitas pendukung PJJ. Selain itu, ada pula beberapa persepsi orang tua yang juga berubah, mengenai peran sekolah dalam proses pembelajaran karena PJJ tak maksimal. Sehingga ancaman putus sekolah ini sesuatu yang *real* dan bisa berdampak seumur hidup bagi anak-anak kita.

Selanjutnya, adalah ancaman penurunan capaian pelajar. Nadiem mengatakan selama PJJ, kesenjangan kualitas antara yang punya akses terhadap teknologi dan tidak itu semakin besar. Kita beresiko mempunyai *learning loss*, *lost generation*, di mana dampak permanen terhadap generasi kita, terutama jenjang yang masih muda," kata Nadiem. Ancaman terakhir adalah meningkatnya kekerasan terhadap anak selama PJJ. Selain itu, anak pun memiliki resiko psikososial, akibat stres terus menerus di dalam rumah dan tak dapat bertemu teman. Namun di sisi lain, Nadiem mengakui bahwa faktor kesehatan dan keselamatan anak juga sama pentingnya. Karena itu, kebijakan pendidikan pemerintah harus multidimensional.⁹

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui Surat Edaran Mendikbud Nomor 4 Tahun 2020 berisi arahan mengenai belajar dari rumah melalui pembelajaran jarak jauh. Berikut sejumlah poin arahnya yaitu memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa, tanpa terbebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum kenaikan kelas maupun kelulusan. Memfokuskan pada pendidikan kecakapan hidup antara lain mengenai pandemi Covid- 19, Memberikan variasi aktivitas dan tugas pembelajaran belajar dari rumah antar siswa, sesuai minat dan kondisi masing-masing, termasuk mempertimbangkan kesenjangan akses/fasilitas belajar dari rumah. Dan memberikan umpan balik terhadap bukti atau produk aktivitas belajar dari rumah yang bersifat kualitatif dan berguna

⁹ <https://nasional.tempo.co/read/1373591/pembelajaran-jarak-jauh-nadiem-makarim-efeknya-negatif-dan-permanen> diakses pada 23 Januari 2021.

bagi guru, tanpa diharuskan memberi skor/nilai kualitatif.

Seperti dilansir *Buku Panduan Pembelajaran Jarak Jauh: Bagi GURU selama Sekolah Tutup dan Pandemi Covid-19 dengan semangat Merdeka Belajar*, terdapat dua prinsip pembelajaran jarak jauh selama masa pandemi yakni:

1. Tidak Membahayakan

Sebagaimana guru di seluruh dunia mencoba untuk mengurangi kemungkinan kerugian dalam belajar karena gangguan sekolah, keselamatan dan kesejahteraan siswa (*students well-being*) harus menjadi hal terpenting untuk dipikirkan. Upaya penyampaian kurikulum secara jarak jauh tidak menciptakan lebih banyak stres dan kecemasan bagi siswa dan keluarganya.

2. Realistis

Guru hendaknya memiliki ekspektasi yang realistis mengenai apa yang dapat dicapai dengan pembelajaran jarak jauh, dan menggunakan penilaian profesional untuk menilai konsekuensi dari rencana pembelajaran tersebut. Adapun peran penting guru di masa pandemi *Covid-19* yakni membantu siswa menghadapi ketidakpastian yang disebabkan oleh pandemi dan melibatkan siswa untuk terus belajar meskipun kegiatan sekolah normal terganggu.¹⁰

Pada pengorganisasiannya SMAN 21 Jakarta membuat kurikulum pembelajaran online tersendiri Pada tanggal 16 maret 2020 SMAN 21 Jakarta melakukan pembelajaran jarak jauh dan ada pengorganisasiannya SMAN 21 Jakarta membuat google classroom pada kelas yang berbeda setelah itu kode kelas dilaporkan ke kurikulum sehingga tim kurikulum pada saat jam kelas mencantumkan kode kelasnya. Namun, jika siswa/siswi yang tidak memiliki google classroom bisa memakai aplikasi *whatsapp*.

¹⁰ <http://pgdikdas.kemdikbud.go.id/read-news/pembelajaran-jarak-jauh-selama-masa-pandemi>. diakses pada 23 Januari 2021

Pada pelaksanaan pembelajaran jarak jauh (PJJ) di SMAN 21 Jakarta minimal pada sehari sebelumnya guru menyampaikan alamat *zoom*, jadwal *zoom* kemudian RPP dan LKPD nya sebelum dimulai pembelajaran. Kemudian setengah jam sebelum mulai pembelajaran pertama kepala sekolah menanyakan pertanyaan supervisi lalu menyaksikan pembelajaran dan yang terakhir menanyakan Kembali pertanyaan terkait supervisi tersebut.¹¹

Adapun keunggulan yang dimiliki SMAN 21 Jakarta adalah memiliki nilai Akreditasi A dengan nilai akhir yang dimiliki adalah 95.00 (versi BAN), Manajemen mutu ISO 9001:2008 dan pernah Sekolah Unggulan, SKM, SSN, RSBI. SMAN 21 Jakarta ini pun telah di anugerahi sebagai sekolah Berbudaya Lingkungan Nasional dan Sekolah Sehat Nasional.

Serta keuntungan lain dari sekolah ini adalah lokasi SMAN 21 Jakarta yang dapat dibidang strategis mudah di jangkau dengan alat transportasi umum seperti bus dan angkot dan letaknya yang berada di dalam kawasan kompleks perumahan sehingga jauh dari kebisingan yang dapat memengaruhi proses belajar mengajar terutama dalam hal konsentrasi belajar siswa. Sekolah SMAN 21 Jakarta ini juga memiliki 2 gedung yang terpisah diantaranya Gedung A dan Gedung B, Gedung A memiliki Gedung 3 tingkat dengan fasilitas di dalamnya diantaranya yaitu 22 Ruang Kelas, Ruang Kepala Sekolah, Ruang Wakil kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Ruang Wakil kepala Sekolah Bidang Kurikulum, Ruang Komite sekolah, Ruang Guru, Ruang Tata Usaha, Ruang Auditorium, Ruang Perpustakaan, Ruang BK, Ruang Olahraga, Ruang Sekretariat OSIS, Ruang Paskibra, Ruang Koperasi Sekolah, Ruang ICT, Ruang UKS, Kantin Sekolah, Masjid, WC dan Kamar Mandi serta Lapangan Parkir. Sedangkan Gedung B memiliki 4 tingkat dengan fasilitas di dalamnya seperti Hall Basket Indoor, Ruang Laboratorium Biologi, Ruang

¹¹ Niyata Sirat, M.Pd Kepala Sekolah SMAN 21 Jakarta (15-10-2020/11.30)

Laboratorium Fisika, Ruang Laboratorium Kimia, Ruang Laboratorium Bahasa, Ruang Laboratorium Komputer (42 unit komputer) dan Ruang Audio Visual.

Pada tahun 2019 SMAN 21 Jakarta berhasil masuk dalam daftar 26 SMA Terbaik Jurusan IPA dengan nilai rata-rata 94.97 dan yang tidak kalah penting sekolah SMAN 21 Jakarta memiliki presentase guru yang kualifikasi sebesar 100%, Presentase Guru berserifikasi sebesar 64.58%, Presentase Guru PNS sebesar 72.92%, dan Presentase Ruang Kelas Layak Sebesar 100%. Dan output yang dihasilkan oleh SMAN 21 Jakarta adalah sebanyak 35 siswa diterima pada Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri pada tahun 2019.

Semua proses pembelajaran yang berbeda dari sebelumnya tentu saja membuat para pendidik sedikit kesulitan. Seperti yang dikatakan oleh kepala sekolah SMA Negeri 21 Jakarta bahwa ini adalah hal yang baru, tentu saja keseluruhan manajemen pembelajaran harus di rubah dan di sesuaikan dengan kondisi yang terjadi sekarang. Beliau mengatakan di awal mungkin sedikit bermasalah karena baru pertama kali, namun setelahnya semua berjalan baik-baik saja.

Karena kegiatan yang tidak biasa dan pertama kali ini peneliti akhirnya tertarik untuk lebih lanjut melakukan penelitian Terkait Manajemen Pembelajaran pada masa Pandemi *Covid-19* di SMA Negeri 21 Jakarta.

B. Fokus dan Subfokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka fokus penelitian ini adalah manajemen pembelajaran di SMAN 21 Jakarta dengan subfokus penelitian:

1. Pengorganisasian pembelajaran di SMAN 21 Jakarta
2. Pelaksanaan pembelajaran di SMAN 21 Jakarta
3. Pengawasan pembelajaran di SMAN 21 Jakarta

C. Rumusan Masalah:

Berdasarkan sub fokus di atas, maka pertanyaan yang akan dikaji dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pengorganisasian pembelajaran pada masa pandemi *Covid-19* di SMAN 21 Jakarta?
2. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran pada masa pandemi *Covid-19* di SMAN 21 Jakarta?
3. Bagaimana pengawasan pembelajaran pada masa pandemi *Covid-19* di SMAN 21 Jakarta?

D. Tujuan penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang ditanyakan di atas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Mengetahui pengorganisasian pembelajaran pada masa pandemi *Covid-19* di SMAN 21 Jakarta.
2. Mengetahui pelaksanaan pembelajaran pada masa pandemi *Covid-19* di SMAN 21 Jakarta.
3. Mengetahui pengawasan pembelajaran pada masa pandemi *Covid-19* di SMAN 21 Jakarta.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dari penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan terkait proses manajemen pembelajaran pada masa pandemi *Covid-19*. Dan juga dapat dijadikan bahan acuan dalam mengkaji manajemen pembelajaran dari sudut pandang yang berbeda dimasa mendatang.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Guru

Dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja dalam proses pembelajaran di kelas, serta dapat mengetahui kendala yang dihadapi dan menemukan solusi atas kendala

tersebut, sehingga dapat meningkatkan inovasi guru dalam proses pembelajaran.

b. Bagi Kepala Sekolah

Dapat digunakan sebagai masukan dan saran dalam mengembangkan pembelajaran serta menjadi informasi tentang perkembangan pendidikan dalam manajemen pembelajaran.

c. Bagi Peneliti

Dapat mengetahui permasalahan yang terjadi terkait manajemen pembelajaran dan menemukan solusi atas permasalahan tersebut, yang kedepannya dapat dijadikan rujukan ketika telah berkecimpung di dunia kerja bidang pendidikan.

